

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Penetapan Panitia Penguji Disertasi	iii
Ucapan Terima Kasih	v
Ringkasan	x
Summary	xiii
Abstrak	xvi
Abstract	xvii
Daftar Isi	xviii
Daftar Peraturan Perundang-undangan	xxi
Daftar Tabel	xxiii
Daftar Bagan/Gambar	xxiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Originalitas Penelitian	12
F. Kerangka Konseptual	14
1. Konsep Kekuasaan Kehakiman	14
2. Teori Independensi Peradilan	19
3. Teori Pengawasan	29
G. Metode Penelitian	41
1. Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah	41
2. Bahan Hukum	42
3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	43
4. Analisis Bahan Hukum	43
H. Sistematika Penulisan	43

BAB II : KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM	
KETATANEGARAAN INDONESIA	46
A. Beberapa Teori Mengenai Sistem Ketatanegaraan	46
1. Teori Pembagian Kekuasaan	46
2. Teori Alat Perlengkapan Negara	53
4. Teori Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan	56
B. Konsep Negara Hukum	62
C. Konsep Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	72
D. Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	79
BAB III : IDE DASAR PELEMBAGAAN KOMISI YUDISIAL KE DALAM	
LINGKUP KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM	
KETATANEGARAAN INDONESIA	96
A. Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia...	96
B. Beberapa Gagasan Dasar Mengenai Esensi Pembentukan Komisi Yudisial	116
C. Kelembagaan Komisi Yudisial Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia	128
D. Keberadaan Lembaga-Lembaga Negara Sejenis Komisi Yudisial	
di Beberapa Negara.....	148
BAB IV : FUNGSI KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA DAN	
MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT	
SERTA PERILAKU HAKIM DIKAITKAN DENGAN	
INDEPENDENSI LEMBAGA PERADILAN	158
A. Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Menjaga dan Menegakkan	
Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim.....	158
1. Fungsi Pengawasan Eksternal Komisi Yudisial Terhadap	
Kekuasaan Kehakiman	158
2. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Sebagai Objek Pengawasan	
Komisi Yudisial	184

B. Asas-asas yang Melandasi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim	201
1. Nilai-Nilai Dasar Profesi Hakim Dalam Menjalankan Fungsi Yudisial.....	201
2. Keseimbangan Asas Kebebasan Hakim (<i>independence of judiciary</i>) dengan Asas Pertanggungjawaban Peradilan (<i>judicial accountability</i>)	224
C. Analisis Putusan Pengadilan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Fungsi Komisi Yudisial	236
1. Kewenangan Komisi Yudisial Menganalisis Putusan Pengadilan	236
2. Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Rangka Pengawasan Perilaku Hakim	248
3. Partisipasi Masyarakat Melalui Komisi Yudisial Dalam Rangka Pengawasan Integritas Hakim.....	256
 BAB V : PENUTUP	 274
A. Kesimpulan	274
B. Saran	275
 Daftar Bacaan	 277

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5493).
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4415).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5250).
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5077).
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078).
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079).
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi.
- Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 01/PB/P. KY/09/2012 Tentang Seleksi Pengangkatan Hakim.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P. KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 03/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 03/PB/P.KY/09/2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04/PB/IX/2012 dan Nomor 04/PB/P.KY/09/2012 Tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat.



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pola Hubungan Kekuasaan Yudisial dengan Eksekutif	92
2. Tiga Perubahan Penting setelah Berlakunya Undang-Undang No. 35 Th. 1999 ...	119
3. Rekapitulasi Laporan Masyarakat ke Komisi Yudisial	174
4. Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim	179
5. Penjabaran singkat Nilai Dasar Profesi hakim Dalam Kode Etik	214
6. Butir-butir Pasal UU Kekuasaan Kehakiman dan SKB yang dinilai dilanggar	240
7. 10 Besar Penerimaan Laporan Masyarakat Mengenai Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Selain Tembusan Berdasarkan Propinsi Asal Laporan.	260
8. Klasifikasi Penanganan Kasus Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	261
9. Rekapitulasi Pemeriksaan Hakim dan Pelapor/Saksi oleh Komisi Yudisial	262
10. Jumlah Jenis Rekomendasi Sanksi Bagi Hakim yang Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	263
11. Pendapat/Penilaian Mahkamah Agung Terhadap 125 Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Kepada Hakim oleh Komisi Yudisial.....	263
12. Jumlah dan Jenis Pelanggaran Perilaku Hakim Sebelum dan Setelah Surat Keputusan Bersama (SKB) Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.....	264
13. Jumlah Hakim yang Direkomendasikan Penjatuhan Sanksi Menurut Tingkatan Pengadilan.....	264
14. Jumlah Hakim yang Direkomendasikan Penjatuhan Sanksi Menurut Jenis Pengadilan.....	265

DAFTAR BAGAN/GAMBAR

	Halaman
Bagan 1. Teori Sibernetika	209
Bagan 2. Hubungan Sibernetik Nilai-Nilai Dasar Profesi Hakim	212
Gambar 3. Penjabaran Nilai-Nilai Dasar Profesi Hakim	213
Gambar 4. Langkah-langkah Pengaduan <i>Online</i> ke Komisi Yudisial	270

